

Potensi

Tira menambahkan, jika tergalai dan terdistribusi dengan baik, Zakat Fitrah memiliki potensi ekonomi yang menjanjikan untuk membantu memerangi kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem.

"Pangan adalah kebutuhan manusia terpenting, sehingga memastikan keter-

cukupan konsumsi pangan terutama bagi penduduk di lapisan terbawah adalah krusial untuk setiap upaya penanggulangan kemiskinan yang kredibel," tutur Tira.

Tujuan akhir yang ingin dicapai Zakat Fitrah adalah pemerataan konsumsi pangan melalui consumption-transfer dari

Sumbangan hal 1 kelompok kaya ke kelompok miskin. "Distribusi konsumsi pangan yang lebih merata, akan menekan masalah-masalah sosial di masyarakat yang berasal dari rendahnya konsumsi pangan seperti kelaparan ekstrem, kurang gizi dan gizi buruk, hingga stunting," tutup Tira. (Ati)-f

Semua

"Bantuan kemasyarakatan dari presiden bukan merupakan bagian dari perlinfos. Anggaran untuk kunjungan presiden dan anggaran untuk bantuan kemasyarakatan presiden berasal dari dana operasional presiden yang berasal dari APBN," jelas Sri Mulyani.

la menjelaskan, dana operasional presiden diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No 48 Tahun 2008 yang diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No 106 Tahun 2008. Sementara itu, dana kemasyarakatan presiden diatur dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara No 2 Tahun 2020.

Berdasarkan aturan tersebut, kegiatan yang bisa dicakup di dalam dana kemasyarakatan oleh presiden dan wakil presiden adalah kegiatan keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi, kebudayaan, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, keolahragaan dan kegiatan lain atas perintah presiden atau wakil presiden. "Bantuan itu bisa diberikan dalam bentuk barang maupun uang," jelas Sri Mulyani.

Kemudian, ia mengungkapkan besar jumlah dana operasional presiden dari tahun 2019 hingga 2024. Untuk ilustrasi, pada tahun 2019, dana operasional presiden ini adalah Rp 110 miliar anggaran. Realisasinya 57,2 miliar atau 52 persen. Pada tahun 2020, alokasi anggaran dana operasional presiden sebesar Rp 116,2

miliar dengan realisasi Rp 77,9 miliar atau 67 persen. Kemudian, alokasi anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp 119,7 miliar dengan realisasi Rp 102,4 miliar atau 86 persen.

Pada tahun 2022, alokasi anggaran sebesar Rp 160,9 miliar dengan realisasi Rp 138,3 miliar atau 86 persen, sedangkan pada tahun 2023, alokasi anggaran sebesar 156,5 miliar dengan realisasi Rp 127,8 miliar atau 82 persen. "Tahun 2024 ini alokasi anggaran untuk dana operasi presiden dan dana bantuan kemasyarakatan Rp 138,3 miliar. Realisasi sampai dengan sekitar Maret dan April Rp 18,7 miliar atau 14 persen," ujar Menkeu.

Pada bagian lain, Sri Mulyani juga menjelaskan, tidak terdapat perubahan yang signifikan untuk anggaran bantuan sosial (bansos) yang dikelola Kementerian Sosial (Kemensos) pada tahun 2024. "Di dalam APBN 2024, tak terdapat perubahan yang signifikan pada anggaran bansos yang dikelola oleh Kemensos," ucapnya.

Pihaknya mengatakan, total anggaran belanja perlindungan sosial (perlinfos) untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp 496,8 triliun. Rinciannya, yakni Rp 75,6 triliun untuk anggaran Kemensos yang disalurkan melalui program bansos seperti program keluarga harapan (PKH), kartu sembako dan program bansos lainnya. Kemudian, Rp 80,5 triliun untuk perlin-

Sumbangan hal 1 sos yang dikelola oleh beberapa kementerian/lembaga, seperti Kemendikbudristek dan Kementerian Agama.

Selain itu, Sri Mulyani, kemarin MK juga memanggil Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini untuk dimintai keterangan.

Mensos Tri Rismaharini mengatakan, bantuan sosial (bansos) yang dikelola kementerian yang ia pimpin disalurkan dalam bentuk tunai (cash) yang ditransfer langsung ke rekening penerima manfaat dan tidak ada dalam bentuk barang. "Bansos di Kemensos bentuknya cash transfer. Jadi, tidak ada dalam bentuk atau natura. Semua transfer ke rekening penerima manfaat, 100 persen," kata Risma.

la mengatakan, bansos dalam bentuk lain selain tunai hanya diberikan untuk merespons kasus-kasus tertentu. Bansos reguler hanya diberikan melalui metode transfer ke rekening penerima manfaat.

"Kecuali respons kasus, jadi ada yang sakit, ada yang disabilitas, butuh bantuan dan itu ia belum menerima bantuan sama sekali, baru kita bentukkan bermacam-macam, mungkin nanti saya bisa tunjukkan fotonya," ucap Mensos.

Dikatakannya, penyaluran bansos tidak dalam bentuk barang atau natura itu dilaksanakan semenjak ia dilantik sebagai Mensos. (Ant/Obi)-f

Ada Penambahan

penerbangan yang ada di Tanah Air guna memenuhi kebutuhan masyarakat saat periode mudik tahun ini. "Ada 2.800 penerbangan. Pesawat yang terbang itu relatif sama 420. Tapi yang terbang lebih banyak, okupansi lebih bagus, lebih tinggi. Jadi ini juga keseriusan dari airlines untuk menyongsong mudik," ujarnya.

Lebih lanjut Budi Karya menyampaikan, pihaknya turut memberikan dukungan dengan menambah jam operasional di bandara guna memaksimalkan rotasi pesawat. "Dengan membuka bandara lebih malam, baik dikelola Angkasa Pura maupun perhubungan di tempat-tempat pesawat. Misal dari satu tempat ke Kariunjawa mestinya berhenti di sana karena petugas sampai jam 2, tapi kita bekerja lebih lama bisa tambah 1-2 rotasi sehingga jumlah yang akan diangkut lebih banyak," katanya.

Di sisi lain, Staf Khusus Menteri Perhubungan Adita Irawati menyampaikan, dari 420 pesawat yang digunakan sebagai angkutan mudik, pihaknya menyiapkan 51 bandar udara sebagai titik pan-tau dari total 287 bandara di Indonesia.

Inflasi

termasuk makanan mentah maupun makanan siap saji.

Pemerintah melalui TPID tim pengendalian inflasi daerah berusaha mengendalikan inflasi yang dipicu karena perilaku belanja maupun ketersediaan barang yang dibutuhkan masyarakat. Masyarakat baru diresahkan karena lonjakan harga beras setelah momen pemilu terjadi. Beras pada Februari 2024 mengalami inflasi 18,41%, beras memberikan andil terbesar pada inflasi bulan Februari, yakni 0,21%. Begitupun lonjakan harga makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,29% dengan tingkat inflasi 1% month to month. Dibandingkan Ramadan dan lebaran lalu, tercatat inflasi naik sebesar 0,95 persen.

Ambiguitas pemerintah antara pengendalian inflasi dan insentif pembakar inflasi kadang membuat kebingungan. Pemerintah resmi mengeluarkan kebijakan yang mengatur pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji 13 melalui PP No. 14/2024 kepada aparaturnegara, pensiunan, penerima pensiun, dan peneri-

ma tunjangan. Nilainya pun lebih besar dengan menambahkan tunjangan kinerja kepada ASN penerima yang jumlahnya lebih dari 4 juta orang.

Kenaikan pendapatan yang seakan digelontorkan pemerintah ditengah masa pemilu dan melambungnya utang luar negeri pemerintah, tentunya perlu dicermati dengan baik. Mengingat pemerintah masih piawai menjaga inflasi pada kisaran 2,5 persen plus minus satu. Lebih dalam lagi perlu dilihat, jangan sampai inflasi akibat THR, kenaikan upah minimum, gaji ke 13 dan berbagai gula-gula yang diberikan pemerintah justru mengakibatkan inflasi pangan. Inflasi pangan pastinya akan sangat berdampak dan dirasakan oleh MBR Masyarakat berpenghasilan rendah. Belum lagi volatilitas produksi pangan dan ancaman ketahanan pangan mempengaruhi terjadinya ketidakmampuan masyarakat dalam menjangkau pangan. ada juga kegelisahan dan rasa sedih sebagian pekerja yang merasa gaji dan THR nya yang terkena pajak perlu dipahamkan agar tidak mengurangi keba-

Sumbangan hal 1 kata Ixfan.

Ixfan menyampaikan, rangkaian KA KLB tambahan relasi Gambir-Yogyakarta akan membawa 11 kereta yang terdiri dari 4 kereta eksekutif, 5 kereta ekonomi, 1 kereta makan dan 1 kereta pembangkit dalam 1 rangkaianannya. Keberangkatan KA KLB tambahan dari Stasiun Gambir dijadwalkan mulai pukul 12.45 WIB dan tiba di Stasiun Yogyakarta pukul 20.25 WIB. KA KLB tambahan relasi Gambir-Yogyakarta mempunyai kapasitas total 560 tempat duduk. "Untuk ketersediaan tempat duduk, dari 4 kelas eksekutif tersedia 200 tempat duduk sedangkan untuk 5 kelas ekonomi tersedia 360 tempat duduk," katanya.

Ixfan mengingatkan, sejak diberlakukan aturan mulai 3 Agustus 2023 lalu, KAI telah menerapkan sanksi bagi pelanggan yang sengaja melebihi relasi tujuan yang tertera pada tiket. Sanksi tersebut berupa denda mencapai dua kali lipat dari harga tiket yang tertera. Aturan ini tidak hanya sebatas tentang denda, tetapi juga bisa berujung pada larangan naik kereta api sementara waktu. (Ant/San/Ati)-f

Sumbangan hal 1 giaan di masa HKBN ini. Mengingat kenaikan harga selama hari besar keagamaan ini tidak bisa dikatakan sebagai ketakutan inflasi. Kenaikan harga pada beberapa jenis komoditas hanya sebagai pemicu terjadinya inflasi, terutama inflasi pangan. Tidak dikatakan sebagai inflasi, karena cuma terjadi temporer dan sementara. Setelah momen hari besar keagamaan, harga akan kembali normal, bahkan permintaan mungkin terjadi sedikit penurunan, karena berbagai pendapatan dialokasikan di awal periode bulanan. Tidak mengklaim THR sebagai pemicu inflasi, tapi berbagai insentif pemerintah yang diberikan diwaktu bersamaan seolah menjadi akumulatif. Perilaku sosial dan budaya maupun insentif THR akan tetap mendorong perilaku konsumsi. Terpenting mengendalikan inflasi dilakukan secara integratif antara pemerintah, perbankan, BPS, pengelola pasar dilakukan dengan ketersediaan barang sehingga harga terkendali. (Penulis, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN Yogyakarta, Pengurus ISEI dan Kafegama DIY)-f

MMKSI Layani Konsumen Perjalanan Mudik

JAKARTA (KR) - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (PT MMKSI) melanjutkan komitmennya untuk mendampingi perjalanan para pelanggan di masa mudik dan libur Hari Raya Idul Fitri, dengan menghadirkan "Mitsubishi Motors Adventure Points". Program ini merupakan bentuk terbaru dari layanan dan fasilitas posko siaga yang dihadirkan.

Ada 7 poin yang tersebar di berbagai lokasi rute strategis Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, yang merupakan pusat konsentrasi aktivitas mudik tertinggi di tanah air selama periode 4-15 April 2024. Tak hanya itu, untuk memastikan rasa aman para pengguna kendaraan Mitsubishi Motors, sebanyak 50 bengkel siaga resmi juga akan dioperasikan di dealer-dealer resmi Mitsubishi Motors di sepanjang rute mudik Lebaran.

Kazuto Azuma, Director of After Sales Division PT MMKSI menerangkan, pada perio-



KR-Istimewa

PT MMKSI siap mendampingi perjalanan para pelanggan di masa mudik dan libur Idul Fitri.

de libur lebaran tahun ini ingin kembali berkontribusi, mendampingi sekaligus memberikan pelayanan maksimal untuk para pengguna kendaraan Mitsubishi Motors yang merayakan Idul Fitri bersama keluarga dan mobil kesayangannya.

"Melanjutkan komitmen tersebut, kami menghadirkan titik singgah yang nyaman berupa Mitsubishi Motors Adventure Points, yang kami sebar di tujuh titik ramai, di Jawa dan Sumatera," katanya.

Tak hanya berfungsi sebagai tempat istirahat para konsumen, tempat ini juga menyediakan beragam paket servis ringan untuk perbaikan ataupun perawatan kendaraan Mitsubishi Motors dengan promo hemat hingga 30 persen. "Kami berharap, tampilan baru Mitsubishi Motors Adventure Points ini bisa menjadi satu titik bagian yang berharga dari perjalanan lifeis adventure para pelanggan di musim mudik Lebaran," pungkask Kazuto. (Sal)-f

Pabrik

Sebelumnya, Rabu (3/4), Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri bersama Direktorat Jenderal Bea Cukai menggerebek rumah industri narkoba jenis sabu dan happy

Sumbangan hal 1 water di daerah Banyumanik Semarang Jawa Tengah. Dalam penggerebekan tersebut ditangkap dua orang pelaku. (Ant/Has)-f

Kasus

Sebelumnya, Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menolak gugatan praperadilan yang diajukan MAKI, KEMAKI, dan LP3HI terhadap Polda Metro Jaya dalam kasus belum ditahannya mantan Ketua KPK Firlil Bahuri, karena dinilai prematur.

Sumbangan hal 1 "Mengadili dalam eksepsi, karena permohonan tidak dapat diterima dalam pokok perkara. Maka menetapkan permohonan praperadilan tidak dapat diterima," kata Hakim Tunggal PN Jaksel Sri Rejeki Marshinta, Jumat (5/4). (Ant/Has)-f

Lebaran,

Selama libur Lebaran Polri menggelar Operasi Ketupat 2024 selama 13 hari dihitung 4-16 April 2024. Operasi kemanusiaan tersebut bertujuan untuk menjaga keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) dan juga keamanan masyarakat yang akan mudik.

Agar mudik berjalan lancar, aman dan bermakna, Polri mengimbau masyarakat untuk mematuhi sejumlah hal. Antara lain, masyarakat diimbau mudik lebih awal menghindari waktu puncak arus mudik dan balik. Atau memilih waktu berangkat maupun kembali untuk menghindari kemacetan. Menyiapkan

Sumbangan hal 1 kondisi diri dan kendaraan serta memastikan saldo e-toll mencukupi. Mentaati peraturan lalu lintas, petugas di jalan dan menghormati pengguna jalan lainnya.

Selain itu, mengutamakan keselamatan sesama pengguna jalan lainnya guna menekan terjadinya laka lantas serta fatalitas korban kecelakaan. Apabila kondisi lelah atau mengantuk istirahat pada tempat yang sudah disediakan (tidak di bahu jalan khususnya di jalan tol). Apabila rest area sudah penuh agar tidak memaksakan untuk masuk, gunakan rest area berikutnya (bila memang perlu keluar menuju jalan arteri). (Ant/San)-f

Pramuka,

Budi menyebut, sebaiknya peraturan tersebut dibatalkan, karena gerakan pramuka menjadi bagian penting dari pembangunan karakter generasi masa depan bangsa.

Sebelum mengukuhkan ketua dan anggota pengurus Kwamas, Presiden Jokowi terlebih dahulu mengajukan pertanyaan dan kesediaan dalam bertugas sesuai isi UU No 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Setelah mendengar jawaban kesediaan dari ketua dan anggota pengurus Kwarnas, Presiden Jokowi membimbing pembacaan Janji Pramuka Tri Satya.

"Selanjutnya, peganglah ujung bendera Sang Merah Putih dengan tangan kanan saudara dan letakkan pada dada sebelah kiri dekat detak jantung sebagai tanda, bahwa selama jantung masih berdetak, saudara akan selalu ingat tugas dan kewajiban Gerakan Pramuka," ucap Presiden seraya mempersilakan ketua dan pengurus membaca Tri Satya.

Acara pengukuhan dilanjutkan dengan penyematan tanda jabatan Ketua Kwarnas Pramuka oleh Presiden kepada Budi Waseso. Kemudian, Budi Waseso memimpin pembacaan ikrar ketua dan anggota pengurus Kwarnas Pramuka. Bagi Budi Waseso, pengukuhan itu, untuk kedua kalinya sebagai Ketua Kwarnas Pramuka Masa Bakti Tahun 2023-2028. Mantan Direktur Perum Bulog tersebut menjadi Ketua Kwarnas Pramuka sejak 2018. Acara pengukuhan di-

Sumbangan hal 1 hadiri oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin serta para menteri, antara lain Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Purnomo, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo. (Ant/Obi)-f

Acara pengukuhan di-



Prakiraan Cuaca		Sabtu, 6 April 2024				
Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Diri Hari	Suhu C	Kelembaban
Bantul					22-30	65-95
Sieman					22-29	65-95
Wates					22-29	65-95
Wonosari					22-30	65-95
Yogyakarta					22-30	65-95



Krisnawati
Dosen Prodi Sistem Informasi
Fakultas Ilmu Komputer
Universitas Amikom Yogyakarta

SISTEM informasi merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan menganalisis data. Hasil dari analisis dan pengelolaan data sering disebut sebagai informasi. Informasi yang dihasilkan selanjutnya

Sasar Pelanggan Spesifik Melalui Behavioral Segmentation

digunakan untuk membantu pengambilan keputusan/ penyelesaian permasalahan dalam organisasi. Saat ini penggunaan system informasi sudah menjadi keharusan dalam organisasi. Pada era Society 5.0 teknologi digunakan untuk memberikan solusi bagi permasalahan yang muncul di masyarakat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan membawa dampak positif juga pada masyarakat. Hal ini mendorong organisasi dan komunitas masyarakat melakukan upaya untuk meningkatkan daya saing dengan menggunakan sistem informasi.

Ciri informasi yang

berkualitas ditandai dengan tiga parameter. Yang pertama, informasi yang dihasilkan sistem informasi harus akurat. Artinya informasi yang dihasilkan harus bebas dari kesalahan. Ada beberapa hal yang mengakibatkan informasi menjadi tidak akurat. Penyebab pertama adalah data yang menjadi input dalam sistem. Bagaimana cara memperoleh data tersebut? Jika data diperoleh melalui pengukuran, dimungkinkan terjadi kesalahan dalam membaca hasil pengukuran data. Kemungkinan lain adalah adanya ketidaksesuaian alat yang digunakan untuk memperoleh data tersebut.

Kadang diperlukan beberapa kali pengambilan data untuk memastikan hasil pembacaan data. Bagaimana teknik untuk mendapatkan data tersebut juga perlu diperhatikan. Misalnya, jika data diperoleh dari hasil wawancara, maka perlu dicari teknik yang tepat sehingga personal sumber data mampu memberikan data sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Data yang akurat belum menjamin informasi yang dihasilkan akurat. Perlu diperhatikan juga bagaimana pengolahan dan analisis data dilakukan. Pemilihan model umumnya disesuaikan dengan kondisi data dan

permasalahan yang dihadapi.

Informasi yang berkualitas selanjutnya ditandai dengan parameter ketepatan waktu. Informasi yang dihasilkan sistem harus tepat waktu. Kapanpun informasi tersebut diperlukan harus selalu tersedia. Untuk menjamin ketepatan waktu akan kebutuhan informasi, perlu identifikasi menyeluruh terhadap kebutuhan informasi pada masing-masing level manajemen. Kalaupun ada beberapa yang kebutuhan informasi yang terlupakan maka perlu segera dilakukan penyesuaian dan penambahan pada sistem informasi yang berjalan.

Ciri terakhir dari informasi berkualitas adalah informasi harus relevan. Artinya informasi harus sesuai dengan kebutuhan. Informasi yang sesuai dengan kebutuhan akan membawa manfaat bagi pengguna dalam melakukan aktifitas selanjutnya. Jika informasi yang dihasilkan tidak sesuai dengan kebutuhan tentunya akan membawa pada konsekuensi pada keputusan yang diambil. Untuk menjamin informasi yang relevan, perlu diidentifikasi juga kebutuhan informasi dari masing-masing level manajemen dalam organisasi. Dimungkinkan beberapa level manajemen



memiliki kebutuhan informasi yang sama namun dalam bentuk yang berbeda.

Dengan informasi yang berkualitas organisasi dapat menghasilkan keputusan yang tepat dan memberikan solusi yang tepat pula terhadap permasalahan yang dihadapi. Hal ini akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja organisasi. Selain itu juga akan memudahkan pihak manajemen dalam melakukan perencanaan, pengawasan, pengendalian dan delegasi pekerjaan dalam lingkup organisasi.